

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Teoritis

2.1.1 Pengetian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan sebagai alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan adanya keinginan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila dianalisis lebih lanjut, sehingga diperoleh informasi yang dapat mendukung kebijakan yang diambil (Kasmir, 2008:7).

Menurut (Susilo, 2009:10) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memuat informasi-informasi dan memberikan keterangan-keterangan mengenai data ekonomi perusahaan yang terdiri dari daftar-daftar yang menunjukkan posisi keuangan dan hasil kegiatan perusahaan untuk satu periode yang meliputi neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan keuangan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.1.3 Fungsi Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2012 : 23) menyatakan laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

2.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2012:6) keterbatasan laporan keuangan adalah :

1. Pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah (*historis*), dimana data-data yang diambil dari data masa lalu
2. Laporan keuangan dibuat umum, artinya untuk semua orang bukan hanya untuk pihak tertentu saja.
3. Proses penyusunan tidak terlepas dari taksiran-taksiran dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
4. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian.
5. Laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi bksn kepada sifat formalnya.

2.1.5 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan terdiri dari:

1. Neraca, menurut (Kasmir, 2014:28) neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu.
2. Laporan laba rugi, menurut (Kasmir, 2014:28) adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
3. Laporan perubahan ekuitas, menurut (Dwi Martani, 2012:126) adalah salah satu unsur laporan keuangan yang lengkap yang harus disajikan oleh suatu perusahaan.
4. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan suatu informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar serta setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu.
5. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan.

2.1.6 Pemakai Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena dapat memberikan informasi yang dapat dibutuhkan para pemakai ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan dapat memberikan keuntungan baginya.

Menurut (Harahap, 2011) para pemakai laporan keuangan berserta kegunaannya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pemegang saham

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, asset, hutang, modal, hasil, biaya, dan laba. Pemegang saham ingin melihat prestasi perusahaan dalam pengolahan manajemen yang diberikan amanah. Ingin mengetahui jumlah deviden yang diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba yang ditahan, dan ingin mengetahui jumlah perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan usaha sejenis.

2. Manajer

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomis perusahaan yang dipimpinnya.

3. Karyawan dan serikat pekerja

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah ia masih harus bekerja apakah pindah dan untuk bias menilai apakah penghasilan yang diterima adil apa tidak.

4. Pemerintah atau lembaga pengatur resmi

Pemerintah ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang ditetapkan.

5. Lembaga swadaya masyarakat

Lemabaga swadaya masyarakat membutuhkan laporan keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindungi.

6. Peneliti atau akademisi

Bagi peneliti atau akademisi laporan keuangan sangat penting. Sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

2.1.7 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, yaitu “analisis” dan laporan keuangan”. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagianbagian yang ada di dalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat (Harahap, 2011:190).

Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin dicapai.

2.1.8 Rasio Keuangan

Menurut (Kasmir, 2012:104) menyatakan rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang

diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

2.1.9 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar (Fahmi, 2012:2). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010).

Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) atau GAAP (General Accepted Accounting Principle), dan lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

2.1.10 Tujuan Kinerja Keuangan

Prayitno (2010 : 9) menyatakan tujuan penilaian kinerja bagi manajemen adalah untuk:

1. Mengelolah operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotifan karyawan secara maksimal.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan menyediakan kriteria promosi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan bagaimana atasan menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar dengan distribusi penghargaan. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya ingin mengetahui kinerja keuangan perusahaan, dimana dalam menganalisa dan menilai posisi keuangan dan potensi atau kemajuan perusahaan terdapat indikator dari kinerja keuangan perusahaan.

Menurut (Mardiasmo, 2008) pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu :

1. Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.11 Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh

dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu pos dengan pos lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar pos yang ada di antara laporan keuangan (Hery, 2015:162).

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis (Mahmudi, 2010:88). Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu dekade dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim, 2012:4),.

Jadi dapat disimpulkan analisis rasio keuangan daerah adalah suatu proses membandingkan angka-angka yang terdapat didalam laporan keuangan, angka-angka tersebut dibandingkan dapat dari satu periode atau beberapa periode, tujuan analisis ini untuk mengetahui tingkat kinerja atau hasil yang dicapai selama periode yang dianalisis.

2.1.12 Manfaat Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD ini sangat berguna bagi beberapa pihak, adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rasio keuangan APBD ini menurut Faud (2016:138), adalah sebagai berikut :

1. DPRD; sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat)
2. Pihak eksekutif; sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat/provinsi; sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur; pihak yang bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.1.13 Jenis Rasio Keuangan Daerah

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berarti perlu alat yang digunakan untuk analisis, salah satu alat yang sering digunakan untuk mengetahui kinerja suatu organisasi adalah menggunakan rasio keuangan. Berikut ini merupakan beberapa rasio keuangan yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang terdapat dalam APBD.

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah (Halim, 2012).. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data *ekstern*). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Thoha (dalam Latuny:2016)

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dan *output*. *Outcome* merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan *output* merupakan hasil yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan (Mahsun, 2014:191).

Kriteria untuk mengetahui nilai efektivitas pajak daerah secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Persentase Efektivitas	Efektivitas Pajak Daerah
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% – 99%	Cukup efektif
75% – 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2010:143)

3. Rasio Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. *Output* merupakan realisasi biaya untuk memperoleh penerimaan daerah dan *input* merupakan realisasi dari penerimaan daerah (Mahsun, 2014: 189). Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini:

Tabel 2.3 Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Persentase Efisiensi	Efisiensi Pajak Daerah
>100%	Tidak Efisien
90% – 100%	Kurang Efisien
80% – 89%	Cukup Efisien
60% – 79	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Abdul Halim (2007:234)

4. Rasio Aktivitas atau Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Abdul Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dengan demikian pemerintah daerah perlu untuk membuat harmonisasi belanja, guna menjaga fungsi anggaran tetap berjalan dengan baik (Mahmudi, 2010:162).

5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Halim, 2012). Rasio pertumbuhan ini dilihat dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin (belanja operasi), belanja pembangunan (belanja modal).

a. Rasio pertumbuhan pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan yang positif dan kecenderungannya (trend) meningkat.

b. Rasio pertumbuhan belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun yang menjadi penelitiaan terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

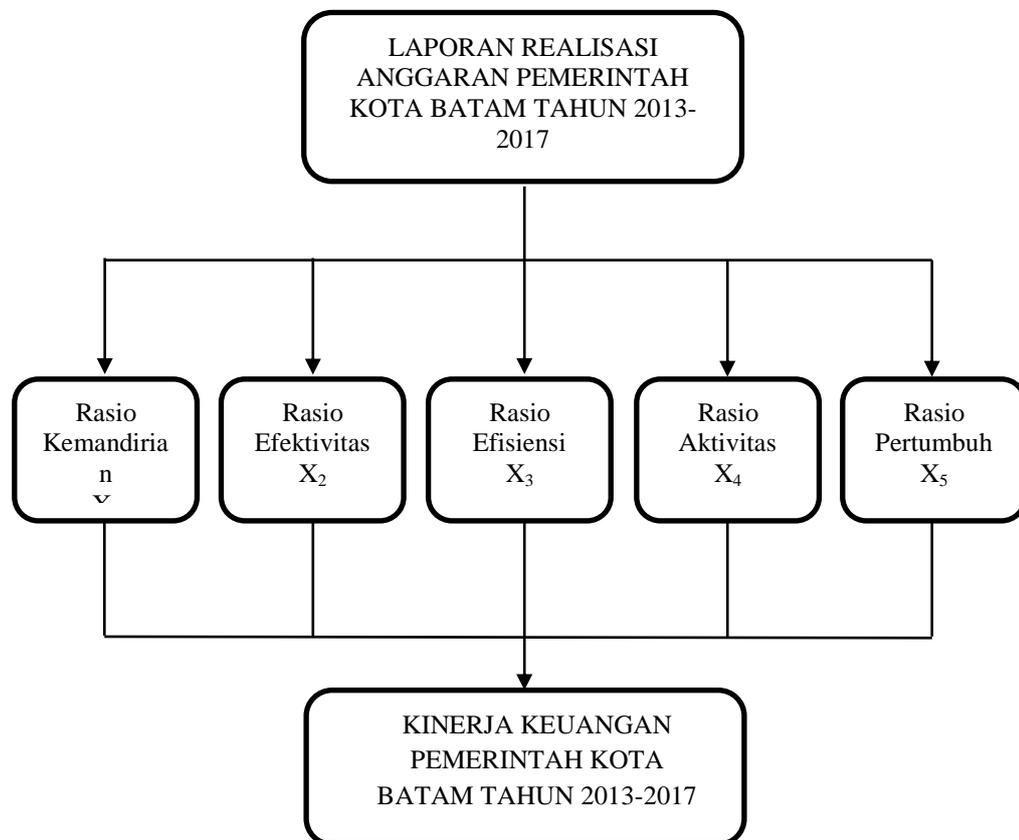
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Kontadengan (2012)	Analisis kinerja keuangan ditinjau dari rentabilitas, likuiditas, dan solvabilitas pada PT. Tri Setia Jujur Bersama Manado	Tingkat kinerja PR. Setia Tri Jujur Bersama Manado ditahun 2008 adalah baik, sedangkan pada tahun 2009 adalah cukup baik dan tahun 2010 adalah sangat baik.
2	Meycich (2009)	Analisis kinerja keuangan untuk mengukur kinerja keangan melalui penilaian tingkat likuiditas, dan solvabilitas.	Berdasarkan analisis laporan keuangan perusahaan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik
3	handayani (2011)	Analisis kinerja keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan pada industri tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada perusahaan industri tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2006, kinerja keuangan perusahaan yang dinilai paling baik adalah PT Ricky Putra globalindo Tbk. Untuk tahun 2007 dan 2008 yang memiliki kinerja paling baik adalah PT <i>Polychen</i> Indonesia Tbk.
4	Praytino(2010)	Peranan analisis laporan keuangan dalam mengukur kinerja perusahaan(studi kasus pada PT.X)	Kinerja keuangan perusahaan menunjukkan ketidakseimbangan antara penndapatan dan biaya serta pengeluaran keuangan hal ini menyebabkan terjadinya fluktuasi pasa pos pos lab rugi mengalami kenaikan untuk setiap tahunnya, dan diimbangi oleh naiknya biaya produksi, untuk laba bersih sebelum pajak mengalami penurunan dari tahun 2 ketahun 1, sedangkan untuk tahun 3 terjadi kenaikan

			dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
--	--	--	---------------------------------------

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang dikemukakan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan pada Dinas Lperhubungan berdasarkan laporan keuangan tahun 2013 sampai 2017 (sudi empiris pada dinas lperhubungan kota batam).



2.4 Hipotesis

Menurut Sanusi (2011: 44) dalam (Nariana, Siti Khairani, 2011), hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang berarti benar. Jadi, hipotesis

adalah kebenaran yang masih diragukan. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian ini bisa dirumuskan sebagai berikut :

1. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Kemandirian tergolong tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif..
2. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Efektivitas PAD berjalan efektif.
3. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong efisien.
4. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Aktivitas atau keserasian berjalan stabil.
5. H : Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Batam periode tahun 2013 - 2017 berdasarkan Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan meningkat.